



RELEVANSI LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA BAGI PENGUATAN PPKN

Fazlan Ade Umri^{1*}, Ade Pranata Ginting², Muhammad Rafli Ashari³, Amin Harahap⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Profesi Guru, Universitas Labuhanbatu, Indonesia

Corresponding Author: fazlanadeumri@gmail.com*

Abstract: This study is motivated by the limited understanding among educators regarding the philosophical foundations of education and the suboptimal integration of value education in learning practices. This study aims to analyze the philosophical foundations of education and the concept of value education from the perspective of Ki Hajar Dewantara's thought. The research employs a qualitative approach using a literature review method by examining various sources, including books, scientific journal articles, and relevant documents. Data were collected through literature searching, reading, and note-taking techniques, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings reveal that the philosophical foundations of education encompass metaphysical, epistemological, and axiological aspects that serve as the basis for determining educational direction, goals, and practices. Value education plays a crucial role in shaping students' character holistically, covering cognitive, affective, and moral dimensions. Ki Hajar Dewantara's perspective emphasizes that education is a guiding process to develop learners' natural potential by maintaining the balance of intellect (*cipta*), feeling (*rasa*), and intention (*karsa*). In conclusion, the integration of philosophical foundations and value education in Ki Hajar Dewantara's perspective remains relevant in addressing contemporary educational challenges and in fostering individuals with strong character and personality.

Keywords: Philosophy of Education, Value Education, Ki Hajar Dewantara, PPKn

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman pendidik terhadap landasan filosofis pendidikan serta kurang optimalnya integrasi pendidikan nilai dalam praktik pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis pendidikan dan konsep pendidikan nilai dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan pencatatan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis pendidikan mencakup aspek metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, dan praktik pendidikan. Pendidikan nilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan moral. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses tuntunan untuk mengembangkan potensi kodrat peserta didik dengan menekankan keseimbangan *cipta*, *rasa*, dan *karsa*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi landasan filosofis pendidikan dan pendidikan nilai dalam perspektif Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan modern serta dalam membentuk manusia yang berkarakter dan berkepribadian.

Kata Kunci: Filsafat Pendidikan, Pendidikan Nilai, Ki Hajar Dewantara, PPKn

Article info: Accepted

Recommended citation: APA Style v.7

How to Cite:

Umri, F. A., Ginting, A. P., Ashari, M. R., & Harahap, A. (2026). Relevansi landasan filosofis pendidikan dan pendidikan nilai dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi penguatan PPKn. *Pancasila and Civics Education Journal*, 5(2), 233-240
<https://doi.org/10.30596/pcej.v%vi%i.30088>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan suatu proses fundamental dalam pengembangan manusia yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses pembentukan karakter, pengembangan moral, serta pembentukan identitas sosial dan kewarganegaraan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, pendidikan dipandang sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang memungkinkan manusia berkembang secara intelektual dan sosial dalam kehidupan demokratis (Dewey, 1916). Senada dengan pandangan tersebut, Freire (1970) menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi proses pembebasan yang mampu membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial. Di era globalisasi dan revolusi digital, pendidikan menghadapi tantangan berupa meningkatnya individualisme, krisis nilai, intoleransi, menurunnya kepedulian sosial, serta kompleksitas permasalahan kewarganegaraan yang menuntut penguatan pendidikan karakter dan pendidikan nilai (UNESCO, 2015; Noddings, 2013). Oleh karena itu, pendidikan abad ke-21 harus mampu mengintegrasikan pengembangan kompetensi akademik dengan nilai moral, sosial, dan kemanusiaan agar mampu menghasilkan individu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, berkeadilan, dan memiliki tanggung jawab sosial. PPKn bukan hanya bertujuan mengembangkan pengetahuan mengenai negara dan demokrasi, tetapi juga membentuk kompetensi kewarganegaraan yang mencakup *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Branson, 1998; Cogan & Derricott, 1998). Sejalan dengan itu, Banks (2008) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang plural, demokratis, dan multikultural. Kajian mengenai *citizenship education* juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi penting dalam menumbuhkan partisipasi sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab terhadap kehidupan publik (Kerr, 1999; Osler & Starkey, 2005).

Meskipun memiliki tujuan yang ideal, implementasi PPKn masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dominasi pembelajaran yang berorientasi pada aspek kognitif dan kurang memberikan ruang bagi pengembangan aspek afektif serta pengalaman kewarganegaraan secara nyata. Pembelajaran yang terlalu menekankan penguasaan konsep sering menyebabkan nilai kewarganegaraan hanya dipahami sebagai pengetahuan tanpa diwujudkan dalam perilaku sosial peserta didik. Lickona (1991) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Pandangan tersebut diperkuat oleh Nucci dan Narvaez (2008) yang menyatakan bahwa pembentukan karakter memerlukan pengalaman sosial, pembiasaan, dan lingkungan pendidikan yang secara konsisten mendukung perkembangan moral peserta didik.

Dalam upaya memperkuat dimensi nilai dalam PPKn, pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan filosofis pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat (Dewantara, 2013). Konsep tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang merdeka, berkeadilan, serta memiliki kesadaran sosial. Konsep kemerdekaan dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki keterkaitan dengan pendidikan humanistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran (Rogers, 1969; Tilaar, 1999).

Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan nilai melalui proses keteladanan, pembiasaan, dan pembentukan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan karakter peserta didik. Prinsip *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani* menegaskan bahwa pendidik memiliki peran sebagai teladan, penggerak, sekaligus pemberi dukungan dalam perkembangan peserta didik (Dewantara, 2013). Selain itu, konsep Tri Pusat Pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak dapat dibebankan kepada sekolah semata, tetapi memerlukan sinergi dari seluruh lingkungan pendidikan (Dewantara, 2013). Konsep tersebut sejalan dengan teori perkembangan moral yang menekankan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan nilai dan perilaku individu (Kohlberg, 1984; Vygotsky, 1978).

Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan PPKn dapat dilihat melalui kesamaan tujuan dalam membentuk warga negara yang memiliki kecerdasan moral, tanggung jawab sosial, nasionalisme, serta kepedulian terhadap kehidupan bersama. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, warga negara yang baik tidak hanya ditandai oleh kemampuan memahami sistem politik dan hukum, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai demokrasi, toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat (Print, 2007; Westheimer & Kahne, 2004). Nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membentuk manusia merdeka yang mampu hidup berdampingan dan berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, landasan filosofis pendidikan memberikan pandangan yang komprehensif dan menyeluruh tentang makna dan tujuan Pendidikan (Thabrani, 2015). Dengan demikian pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara memperhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau *transfer of knowledge*, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai (*transformation of Value*). Dengan kata lain pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benar manusia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perspektif pendidikan karakter, pendidikan humanistik, serta implementasinya dalam kebijakan Merdeka Belajar. Misalnya, penelitian Samho (2014) menekankan relevansi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan manusia yang berbudaya dan ber karakter, sedangkan studi Widodo (2021) menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki kontribusi dalam penguatan pendidikan karakter pada era modern. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara landasan filosofis pendidikan dan pendidikan nilai dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai basis konseptual dalam memperkuat paradigma Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek pedagogis umum dan belum secara mendalam menghubungkannya dengan pengembangan dimensi *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Bahkan, konsep-konsep ini telah berkembang menjadi bidang ilmu tersendiri yang menitikberatkan pada dasar-dasar serta tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, mempengaruhi perkembangan ilmu sosial dan humaniora dengan pengaruh filsafat yang kuat (Silmi et al., 2023).

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi landasan filosofis pendidikan dan pendidikan nilai dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kajian ini menawarkan kontribusi konseptual dalam pengembangan paradigma PPKn yang lebih humanis dan berbasis nilai, dengan menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan warga negara yang tidak hanya cerdas

secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, tanggung jawab sosial, kesadaran demokratis, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat global yang kompleks.

METHODS

Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur. Metode tinjauan literatur yang digunakan adalah aktivitas yang mencakup membaca dan mencatat bahan penelitian, mengumpulkan data pustaka, dan mengelolah bahan penelitian (Juliangkary & Pujilestari, 2022). Metode tinjauan literatur tidak hanya membaca dan mencatat, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara filsafat pendidikan dengan praktik nyata di sekolah. Data tentang filsafat pendidikan dibahas secara menyeluruh dalam konteks objek penitilian ini. Selanjutnya, proses pengumpulan data dianalisis, dan terakhir adalah kesimpulan dari penelitian (Kurnia et al., 2023).

RESULT AND DISCUSSION

Landasan filosofis pendidikan mengacu pada pijakan filosofis yang menjadi dasar atau fondasi bagi pendidikan. Istilah "landasan" diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Dalam konteks ini, landasan filosofis pendidikan merupakan fondasi atau dasar yang menyokong eksistensi dan prinsip-prinsip fundamental dari pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan adalah titik tumpu atau titik tolak yang membentuk dasar pemikiran dan pandangan filosofis yang menjadi landasan bagi segala aspek Pendidikan (Riyansyah, 2004). Struktur Landasan Filosofis Pendidikan dapat dipahami sebagai sistem gagasan tentang pendidikan yang didasarkan pada cabang-cabang filsafat umum, yaitu Metafisika, Epistemologi, dan Aksiologi. Landasan filosofis pendidikan terdiri dari Metafisika, Epistemologi, dan Aksiologi, yang menjadi titik tolak dalam memahami tujuan pendidikan. Pendidikan nilai memperkuat dimensi moral, estetika, dan etika, sehingga membentuk manusia yang utuh. Menurut Callahan and Clark (1983) dan Edward J. Power (1982), landasan filosofis pendidikan merupakan deduksi atau penjabaran dari sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dari kedua sumber tersebut, terlihat adanya hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum dengan gagasan-gagasan Pendidikan.

Karakteristik Landasan Filosofis Pendidikan terdiri dari gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Ini berarti bahwa landasan filosofis pendidikan tidak hanya menggambarkan pendidikan apa adanya (faktual), tetapi juga mencakup konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau diinginkan (ideal), yang disarankan oleh filsuf tertentu sebagai pedoman dalam praktik pendidikan dan/atau studi pendidikan. Dalam Landasan Filosofis Pendidikan, terdapat berbagai aliran atau arah pemikiran yang mencerminkan pendekatan filosofis yang berbeda. Contohnya, ada landasan filosofis pendidikan Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dan sebagainya. Setiap aliran memiliki pandangan dan nilai-nilai filosofis yang khas terkait dengan tujuan dan metode Pendidikan (Falah, 2017).

Pendidikan nilai merupakan bagian integral dalam proses pendidikan itu sendiri, pendidikan nilai menjadi konsep yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran karena pada hakikatnya seluruh pembelajaran pasti bermuara pada "nilai atau karakter". Hakam (2008) menjelaskan bahwa pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan dari sudut pandang non moral, yang meliputi estetika yaitu menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam membangun hubungan antar pribadi. Sementara, Supiadi (dalam Purwaningsih, 2010: 46) mengungkapkan bahwa pendidikan nilai adalah berbagai aspek pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik yang berkaitan dengan nilai kebaikan, sehingga siswa dapat memilih nilai yang baik dan benar dengan penalaran dan pertimbangan nilai secara konsisten. Lebih jauh lagi Kaswardi (dalam

Purwaningsih,2010) mengungkapkan dengan pendidikan nilai merupakan dimensi penanaman dan pengembangan nilai subjek/ seseorang untuk mencapai etika dan moral yang diinginkan (Ristekdikti, 2017).

Pendidikan nilai menyentuh komponen yang berakar untuk memanusiakan manusia, sehingga dapat membentuk manusia yang insan kamil dan paripurna secara utuh sebagaimana diungkapkan dalam konsep pemikiran Drikarya (Zaim Elmubarok, 2008) yang mengungkapkan bahwa untuk dapat menhidupkan nilai afeksi manusia maka diperlukan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, seseorang dapat memunculkan sisi kemanusiaannya apabila mendapatkan sentuhan sisi afektifnya dan mencapai tujuan pendidikan. Drikarya juga mengungkapkan tentang pengalaman pertama terkait kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan akan muncul apabila mereka menemukan pengalamannya secara kongkrit, bukan melalui sebuah hal konseptual atau teori.

Pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan menegaskan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu proses menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hakikat pendidikan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar pengajaran, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya melalui tuntunan yang sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dalam pandangan beliau, guru memiliki peran sentral sebagai penuntun, bukan penguasa mutlak atas diri anak. Guru diibaratkan seperti petani yang merawat tanaman: ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan melindungi tanaman dari hama, tetapi tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi jagung. Analogi ini menegaskan bahwa guru tidak boleh memaksakan kehendak, melainkan harus menyesuaikan diri dengan kodrat anak dan membantu mereka berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Selain itu, Ki Hadjar Dewantara menekankan Pemahaman yang memperhatikan kodrat keadaan, yaitu lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan keluarga yang memengaruhi perkembangan anak.

Anak yang baik dasarnya bisa rusak karena pengaruh lingkungan yang buruk, sementara anak yang kurang baik dasarnya dapat berkembang lebih baik dengan tuntunan yang tepat. Konsep kodrat keadaan menegaskan bahwa lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi sangat memengaruhi perkembangan anak. Guru harus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi nyata. Konsep kodrat keadaan ini relevan dengan pendidikan masa kini, di mana guru dituntut untuk memahami latar belakang peserta didik dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi nyata di lapangan. Lebih jauh, Ki Hadjar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti sebagai inti dari pembentukan karakter. Menurut beliau, kecerdasan intelektual saja tidak cukup, karena watak biologis seperti rasa takut, rasa malu, atau rasa egoisme tetap melekat dalam diri manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan pada penguasaan diri (*zelfbeheersing*), sebab adab atau keadaban berarti kemampuan mengendalikan diri. Pandangan ini sangat relevan dengan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi prioritas nasional saat ini, khususnya dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman, yaitu perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam konteks masa kini, hal ini berarti pendidikan harus adaptif terhadap era digital, memanfaatkan teknologi informasi, dan menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara tetap aktual dan menjadi landasan filosofis bagi pendidikan Indonesia. Pendidikan sebagai tuntunan kodrat anak, peran guru sebagai penuntun, perhatian terhadap kodrat keadaan dan kodrat zaman, serta penekanan pada budi pekerti dan penguasaan diri, semuanya merupakan prinsip yang relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Keseluruhan gagasan tersebut menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, melainkan pembentukan manusia berkarakter, berbudaya, dan merdeka, sehingga mampu hidup bahagia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan arah, tujuan, serta praktik pendidikan. Landasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga normatif, karena memberikan pedoman mengenai bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Dalam konteks ini, aspek metafisika, epistemologi, dan aksiologi menjadi pilar utama yang membentuk kerangka berpikir dalam memahami hakikat pendidikan, proses memperoleh pengetahuan, serta nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada peserta didik.

Pendidikan nilai sebagai bagian integral dari pendidikan menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembentukan karakter. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada *transfer of knowledge*, tetapi juga pada *transformation of values* yang bertujuan membentuk manusia yang bermoral, beretika, dan berkepribadian. Oleh karena itu, pendidikan nilai menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan degradasi moral serta perubahan sosial di era modern.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Konsep pendidikan sebagai tuntunan menegaskan bahwa peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan yang memiliki kodrat dan potensi masing-masing. Peran pendidik bukan sebagai pengendali, melainkan sebagai penuntun yang membantu mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Selain itu, penekanan pada keseimbangan cipta, rasa, dan karsa menunjukkan bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan aspek intelektual, emosional, dan moral secara harmonis.

Lebih lanjut, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan masa kini terlihat pada pentingnya memperhatikan kodrat zaman dan kodrat keadaan. Pendidikan dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta keberagaman latar belakang peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa landasan filosofis pendidikan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai proses humanisasi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan internalisasi nilai. Temuan kajian menunjukkan bahwa pendidikan nilai dalam perspektif Ki Hajar Dewantara diwujudkan melalui prinsip keteladanan, pembudayaan nilai, dan pendidikan yang memerdekakan sebagai dasar pembentukan manusia yang beradab dan bertanggung jawab.

Hasil kajian juga menunjukkan relevansi pemikiran tersebut dalam menjawab tantangan pendidikan kontemporer, khususnya penguatan pendidikan karakter dan implementasi nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan sosial. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi memiliki implikasi praktis dalam pengembangan proses pembelajaran yang berorientasi nilai.

Dalam konteks Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Pancasila, temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman filosofis bagi calon guru sebagai dasar merancang pembelajaran yang menanamkan nilai Pancasila, karakter kewargaan, dan pembentukan peserta

didik yang demokratis serta berintegritas. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai pijakan konseptual bagi penguatan kompetensi calon guru Pendidikan Pancasila.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa integrasi antara landasan filosofis pendidikan, pendidikan nilai, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pendidikan yang holistik. Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang kuat akan mampu menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, moralitas, dan kepribadian yang baik, sehingga mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, tujuan, dan praktik pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan proses menuntun peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan demikian, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai menjadi komponen esensial dalam proses pendidikan karena berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik. Implementasi pendidikan nilai tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis, melainkan perlu diwujudkan melalui keteladanan, pembiasaan, budaya sekolah, serta interaksi sosial yang mendukung perkembangan karakter. Dalam konteks ini, guru memiliki peran strategis sebagai pendidik sekaligus teladan yang mampu menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik melalui praktik pembelajaran yang humanis dan berorientasi pada pengembangan karakter. Selain itu, lembaga pendidikan perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi penguatan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan secara berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung oleh kebijakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, penguatan landasan filosofis pendidikan dan implementasi pendidikan nilai secara konsisten menjadi langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

REFERENCES

- Banks, J. A. (2008). *Diversity, group identity, and citizenship education in a global age*. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education: A forthcoming education policy task force position paper from the Communitarian Network*. Center for Civic Education.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Kogan Page.

- Dewantara, K. H. (2013). *Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka: Bagian I pendidikan*. UST-Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1962)
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. The Macmillan Company.
- Falah, R. Z. (2017). Landasan Filosofis Pendidikan Perspektif Filsafat Pragmatisme Dan Implikasinya Dalam Metode Pembelajaran. *Elementary*, 5(2), 374–392. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/elementary/article/download/2993/pdf>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. Qualifications and Curriculum Authority (QCA).
- Kohlberg, L. (1984). *Essays on moral development: Vol. 2. The psychology of moral development*. Harper & Row.
- Kurnia, S., Novia Santi, A., Dwi Hendri Yenni, T., Ayu, M., & Negeri Padang, U. (2023). Pentingnya Penerapan Filsafat Pendidikan Oleh Guru Sekolah Dasar. 08, 2477–2143.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education* (2nd ed.). University of California Press.
- Nucci, L. P., & Narvaez, D. (Eds.). (2008). *Handbook of moral and character education*. Routledge.
- Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship: Democracy and inclusion in education*. Open University Press.
- Print, M. (2007). Citizenship education and youth participation in democracy. *British Journal of Educational Studies*, 55(3), 325-345. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00382.x>
- Ristekdikti. (2017). Memandang Revolusi Industri dan Dialog Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Indonesia. Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn: A view of what education might become*. Charles Merrill.
- Samho, B. (2014). Visi pendidikan Ki Hadjar Dewantara: Tantangan dan relevansi. *Jurnal Melintas*, 30(3), 285-307.
- Silmi, S. P., Indonesia, U. P., Sauri, S., & Indonesia, U. P. (2023). *Filsafat Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*. 29.
- Syahril, Iwan. Proklamasi dan Transformasi Pendidikan di Indonesia Abad 21, <http://edukasi.kompasiana.com/2013/08/18/proklamasi-dan-transformasi-pendidikan-indonesia-abad-ke-21-585038.html> (laman diakses tanggal 15 September 2016).
- Thabrani, A. M. (2015). *Filsafat Dalam Pendidikan*. IAIN Jember Press.
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional*. Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. UNESCO Publishing.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Widodo, H. (2021). Pendidikan karakter berbasis pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 1-15.